

**Dukungan Arab Saudi Terhadap Rezim Pemerintahan  
Hamad Bin Isa Al-Khalifa Di Bahrain  
Pada Tahun 2011-2014**

Febrian Andri<sup>1\*</sup> & Pazli<sup>2\*</sup>

***Abstract***

This research analyzes the reasons of Saudi Arabia gave support to the regime of Hamad bin Isa Al-Khalifa in 2011-2014. Saudi Arabia provides economic assistance through the GCC (Gulf Cooperation Council), joint security forces in Peninsula Shield Force, denounced the involvement of other countries in the internal affairs of Bahrain and to support the implementation of the national dialogue and independent fact-finding body as a solution to solving problems political crisis in Bahrain. This research applying qualitative methods and library research. The author used security theory by Barry Buzan with the level of the nation-state analysis with realish prespective. The sources of this research are from of books, journals, publications, articles, news and internet. Saudi Arabia support regime Hamad Bin Isa Al-Khalifa cause Bahrain's conflict poses a threat to the security of ideology and Saudi Arabia's security. Based on the hypothesis: the interests of Saudi Arabia to suppress the threat of Shia ideology and maintain the existence of the Sunni's government in Bahrain, there was increas of dominance of the Shia through bahrain political crisis, and threatened of the regime of Sunni bahrain which is an importantly region of Saudi Arabia in the bay. including threats of security from a potential increas of the conflict in Bahrain with the influence and the threat of Iran in Bahrain, the security against the assets of diplomatic and trade lines as well as the security of citizens of Saudi Arabia in Bahrain.

***Keywords:*** *Conflict Bahrain, Support, Hamad bin Isa Al-Khalifa, Ideological Threats, Security*

**Pendahuluan**

Tulisan ini akan menjelaskan dukungan Arab Saudi terhadap rezim pemerintahan Bahrain di bawah kepemimpinan Hamad bin Isa Al-Khalifa pada tahun 2011-2014. Wacana demokrasi yang ditawarkan oleh Barat ternyata tidak mampu menurunkan rezim pemerintahan otoriter yang berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Salah satunya adalah rezim Hamad bin Isa Al-khalifa yang dinilai otoriter oleh pemberontak-pemberontak yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan pada hari kemarahan atau yang lebih dikenal "day of

---

1 \* Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP UR Angkatan 2011.

2 \* Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.

rage”<sup>3</sup> yang membangkitkan semangat kaum muda melakukan aksi demonstrasi pada Februari dan Maret 2011.

Hamad bin Isa Al-Khalifa adalah seorang pemimpin negara paling kecil di kawasan Teluk dengan luas daratan sekitar 760 km<sup>2</sup> serta total perkiran penduduk pada tahun 2010 sekitar 1,314,089 jiwa dengan komposisi 46% Bahraini, 45.5% Asian 4.7% Arab lainnya, 1.6% Afrika 1% Eropa dan 1.2 % lainnya.<sup>4</sup> yang mulai dikritik pada 14 Februari 2011 ketika seorang pemuda 21 tahun mati tertembak oleh pasukan keamanan pemerintah dalam memadamkan aksi demonstran di pusat ibukota Manama.<sup>5</sup> Pada masa ke-11 tahun periode pemerintahannya sejak menjadi *Amir* pada tahun 1999 dan menjadi Raja pada tahun 2001. Di sebelah Barat Bahrain, terdapat Arab Saudi dengan menyeberangi *Fadh Causeway* sepanjang 25 km, dan di sebelah Timur melintasi Teluk penerbangan sekitar 15 menit terdapat Iran.<sup>6</sup>

Pengamat mengatakan bahwa fenomena yang terjadi pertengahan bulan kedua 2011 adalah wabah dari *Arab Spring* yang berhasil ditahan oleh negara besar Arab Saudi dengan menjalankan peran manipulasi dan provokasinya di kawasan Teluk.<sup>7</sup> Sementara jika dilihat dari krisis politik, sosial dan ekonomi, krisis yang terjadi di Bahrain sangat pelik, bahkan ada yang mengatakan bahwa Bahrain terjebak dalam lingkaran setan mengingat ada persaingan ideologi dan keterlibatan kepentingan negara-negara besar dalam penyelesaian konflik.

Fenomena *Arab Spring* atau wacana demokrasi Barat yang mengalihkan sistem pemerintahan monarki konstitusional ke sistem demokrasi hanya mampu menurunkan Perdana Menteri Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, Hosni Mubarak, Muammar Al-Gaddafi (Perdana Menteri Tunisia, Mesir, Libya) tetapi tidak dengan rezim Hamad bin Isa Al Khalifa di Bahrain. Wacana demokrasi hanya menggoyahkan rezim, realitasnya Hamad bin Isa Al-Khalifa masih tetap berdiri

3 Day Of Rage Adalah Sebutan Nama Yang Diberikan Pemprotes (Penyangga) Bahrain Pada 14 Februari 2011 Dan Sebutan Komunitas 14 February Revolution Youth Coalition Di Media Sosial.

4 Cia, The World Factbook Bahrain Tersedia Di <Http://Www.Cia.Gov/Library/Publications/Resources/The-World-Factbook/Geos/Ba.Html> Diakses [20 Desember 2014]

5 Bill Law, *Bahrain Protests Prompt Global Concerns*. Bbc News 15 Februari 2011, Tersedia Di <Http://Www.Bbc.Com/News/World-Middle-East-12471243> Diakses [20 Desember 2014]

6 Ed Husein, *Bahrain: The Price And The Ayatollah*, Tersedia Di [Http://Www.Nytimes.Com/2012/05/02/Opinion/The-Prince-And-The-Ayatollah.Html?Pagewanted=All&\\_R=0](Http://Www.Nytimes.Com/2012/05/02/Opinion/The-Prince-And-The-Ayatollah.Html?Pagewanted=All&_R=0) [Diakses 25 November 2014]

7 Lars Erstev Andersen, *Bahrain And The Global Balance Of Power After The Arab Spring*, Diis Working Paper 2012:10

setelah banyaknya demonstrasi besar-besaran, aksi boikot serta dapat melancarkan pemilu legislatif pada 22 November 2014 dengan dikawal ketat oleh sekutu Barat dan pasukan keamanan negara-negara tetangga, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).<sup>8</sup>

Krisis di Bahrain mulai menanjak pada perseteruan pemilihan parlemen 2010. Parlemen retak dan pihak oposisi menolak untuk mengambil bagian dari proses politik serta menilai kepemimpinan tidak jujur. Karena keretakan, semua keputusan yang dibuat pemerintahan, loyal pada kerajaan dan lebih menguntungkan pihak loyalis pemerintah.<sup>9</sup>

Terinspirasi dari perkembangan di Tunisia dan Mesir, oposisi Bahrain juga berharap bisa mengantikan kepemimpinan Hamad bin Al Khalifa. Aksi protes dimulai 14 Februari 2011 dimana para demonstran yang didominasi kelompok Syi'ah mulai turun ke jalan dengan menyuarakan nyanyian "*Tahrir Cairo*" di alun-alun kota. Aksi brutal dari beberapa golongan kecil menyebabkan pasukan keamanan diturunkan, sehingga bentrokan yang terjadi menyebabkan dua orang pengunjuk rasa meninggal. Hari demi hari, bentrokan susulan pun terjadi antara pihak keamanan dan kelompok-kelompok pemuda yang turun ke jalan, berputar-putar menuju bundaran, menyebabkan dua orang tertembak dan tergeletak di jalan. Gambar dan video demikian diposting di Youtube dan mulai mendunia.<sup>10</sup>

Menanggapi kematian tujuh orang pasca tragedi 14 Februari, pada tanggal 27 Februari 2011, 18 orang anggota parlemen mengundurkan diri terkait protes terhadap kematian demonstran anti-rezim dan pasukan keamanan.<sup>11</sup> Aksi protes dan demonstrasi berlanjut dan memuncak pada bulan Maret 2011, demonstran pro-demokrasi bergejolak di bundaran Mutiara sehingga melibatkan pihak asing dalam meredamkan aksi serta untuk mencapai suasana yang kondusif. Pasukan keamanan GCC (*Gulf Cooperation Council*) dan *Peninsula Shield Force* (PSF) memasuki Bahrain untuk membantu memulihkan ketertiban di kerajaan setelah tingkat dan intesitas anti-pemerintah meningkat tajam dan penyebaran datang atas undangan pemerintah Bahrain.<sup>12</sup>

8 Associated Press, *Bahrain Holds Its First Major Vote Since Unrest*, Mailonline 22 November 2014 Tersedia Di <Http://Www.Dailymail.Co.Uk/Wires/Ap/Article-2845054/Bahrain-Holds-Major-Vote-Unrest.Html> [22 Desember 2014]

9 Lars Erstev Andersen, *Op.Cit.*

10 *Ibid.*

11 Edigius Patrinistik, *As "Dukung Dialog Nasional Bahrain"* Kompas 28 Februari 2011, Tersedia Di <Http://Internasional.Kompas.Com/Read/2011/02/28/08530183/As.Dukung.Dialog.Nasional.Bahrain> Diakses [20 Desember 2014]

12 Frank Kane, *Uae And Saudi Arabia Send Forces To Bahrain*. The National World 15 Maret

Arab Saudi adalah negara yang paling dominan mendukung rezim pemerintahan Bahrain, sebagaimana pada tanggal 20 Februari 2011 Wakil Perdana Menteri II Arab Saudi, Pangeran Nayef bin Abdulaziz, menyempatkan panggilan telepon ke Bahrain kepada Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa untuk membahas hubungan bilateral. Pangeran Nayef menekankan bahwa Arab Saudi berdiri dengan Bahrain dan mendesak rakyat negara itu untuk menjaga keamanan mereka, stabilitas dan persatuan nasional. Nayef berharap untuk kelanjutan dari kemajuan dan kemakmuran di Bahrain dibawah kepemimpinan saat ini. Sebagaimana dalam sebuah pernyataan resmi, Kerajaan menyatakan harapan untuk pemulihan, stabilitas Bahrain serta mengimbau rakyat negara itu untuk menggunakan pemikiran rasional dalam mengedepankan sudut pandang mereka dan menerima apa yang telah disampaikan pemerintah kepada mereka.<sup>13</sup> Serta pernyataan resmi kerajaan menekankan penolakan mutlak dari setiap campur tangan asing dalam urusan internal Bahrain dari pihak manapun dan menekankan komitmennya untuk berdiri dengan segala kemampuan belakang tetangga Arab termasuk (Bahrain).<sup>14</sup> Sementara untuk meredakan konflik pada bulan Februari, dalam pertemuannya di Riyadh, pada 10 Maret 2011, Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyimpulkan bahwa GCC meyediakan dukungan untuk Bahrain dan Oman sebesar USD 20 miliar dengan janji USD 2 miliar untuk paket dukungan ekonomi lebih dari 10 tahun, masing-masing negara akan menerima USD 10 miliar untuk pembangunan ekonomi.<sup>15</sup>

Pada saat meningkatnya intensitas konflik pada pertengahan Maret 2011, Arab Saudi mengerahkan 1200 pasukan keamanan dan 30 tank di bawah perintah Raja Abdullah dikomandoi Pangeran Nayef bin Abdul Aziz dan dipayungi bendera *Peninsula Shield Force* (PSF) melintasi *Fadh Causeaway* untuk melindungi tempat-tempat strategis, serta memadamkan pemberontakan dan ketegangan antara keluarga penguasa Sunni dan demonstran Syiah atas dasar permohonan permintaan bantuan dari negeri tetangga yang telah mengalami demonstrasi pada 15 Februari hingga pertengahan Maret 2011.<sup>16</sup>

---

2011. Tersedia Di [Http://Www.TheNational.Ae/News/World/Middle-East/Uae-And-Saudi-Arabia-Send-Forces-To-Bahrain](http://Www.TheNational.Ae/News/World/Middle-East/Uae-And-Saudi-Arabia-Send-Forces-To-Bahrain) Diakses [20 Desember 2014]

13 Saudi Embassy, *Foreign Relations, Infokus 22 Februari 2011*, Tersedia Di <Http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2011/11-Focus-02-22.Pdf>

14 Ibid.

15 Saudi Embassy, *Foreign Relation, Infokus 15 Maret 2011*, Tersedia Di <Http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2011/11-Focus-03-15.Pdf>

16 Theguardian, *Saudi Arabian Troops Enter Bahrain As Regime Asks For Help To Quell Uprising*, Tersedia Di <Http://Www.Theguardian.Com/World/2011/Mar/14/Saudi-Arabian-Troops-Enter-Bahrain>, [22 Februari 2015]

Setelah dua tahun penerbitan laporan *Bahrain Independent Comission Inquiry* (BICI) sebuah badan yang dibentuk untuk menyelidik kasus Februari dan Maret 2011, situasi politik dalam negeri pun belum terpecahkan, meskipun telah banyak kritikan dan protes pada kerusuhan tahun 2011 menjadi agenda internasional. Pemerintah Bahrain mengeluh bahwa masyarakat internasional telah salah memahami situasi di Bahrain. pemerintah berpendapat bahwa oposisi pro-demokrasi didorong oleh sekretarian (diskriminasi atau kebencian yang muncul diantara yang didominasi perbedaan agama) dan menganggap demonstrasi tersebut illegal serta mengahambat dan membahayakan kehidupan masyarakat biasa.<sup>17</sup>

Protes oposisi berubah menjadi kekerasan bahkan pemboman di Manama dimana pemerintah menyalahkan Hizbulullah. Namun, kelompok-kelompok oposisi mengklaim bahwa penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian disponsori oleh pemerintahan yang sedang berlangsung, karena situasi telah berkembang menjadi perbedaan yang bernuansa kelompok, termasuk Islam dan sekuler, serta ekspatriat domestik telah tersambung dengan kelompok lain yang di luar negeri. Dan memungkinkan konflik semakin lama semakin terus membesar.<sup>18</sup> Buntut dari konflik yang terjadi selama konflik 15 februari 2011 sampai maret 2014 lebih dari 80 orang warga sipil dan 13 anggota kepolisian meninggal.<sup>19</sup>

## Hasil dan Pembahasan.

Dalam hubungan internasional negara selalu berurusan dengan isu-isu perang dan damai. Konsep keamanan menyajikan prioritas yang logis dalam menganalisis fenomena keamanan yang terjadi mengingat negara-negara saling berbenturan dalam mencapai kepentingan pada aspek hubungan internasional yang penuh konflik. Barry Buzan mendefenisikan keamanan adalah kebebasan dari ancaman.<sup>20</sup> Keamanan diambil untuk mengejar kebesaran dari ancaman dan kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas independen mereka dan integritas fungsional mereka terhadap kekuatan perubahan

17 Ronald E. Neumann, Bahrain: A Very Complicated Little Island, Winter 2013, Volume Xx, Number 4, Tersedia Di [Http://Www.Mepc.Org/Journal/Middle-East-Policy-Archives/Bahrain-Very-Complicated-Little-Island?Print](http://Www.Mepc.Org/Journal/Middle-East-Policy-Archives/Bahrain-Very-Complicated-Little-Island?Print) Diakses [4 April 2015]

18 Ibid.,

19 Bbc, Bomb Blast Kills Three Bahrain Policemen, Tersedia Di <[Http://Www.Bbc.Com/News/World-Middle-East-26421744](http://Www.Bbc.Com/News/World-Middle-East-26421744)> Diakses [28 November 2013]

20 Vladimir Sulovic , Meaning of Security and Theory of Securitization, 2010. Bcsp Intern Serbia: Belgrade Centre For Security Policy. Hal 1

yang mereka lihat sebagai bermusuhan. inti dari keamanan adalah kelangsungan hidup yang juga mencakup berbagai substansial dari kekhawatiran berhenti untuk mendapat ungensi dari label keamanan (yang mengidentifikasi ancaman cukup sebagai jaminan tindakan darurat dan langkah-langkah yang luar biasa termasuk pengunaan kekuatan yang signifikan) yang menjadi bagian dari ketidak pastian kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

Teori keamanan dipakai dalam melihat tingkah laku negara sebagai objek utama dalam hubungan internasional. Keamanan adalah kelangsungan hidup yang mencakup terhadap berbagai kekwatiran substansial tentang kondisi keberadaan (yang mengidentifikasi bahwa menjamin tindakan darurat dan langkah-langkah yang luar biasa), termasuk menggunakan kekuatan yang signifikan. Realis memandang Konsep keamanan tradisional sebagai turunan konsep power. *Pertama*, mengurangi kompleks keamanan merupakan sebuah sinonim dari kekuasaan. *Kedua*, pandangan ini dianggap relevan selama negara-negara tampaknya berada dalam perjuangan terus menerus untuk mencari kekuasaan.<sup>22</sup>

Dalam memahami keamanan Barry Buzan membahas lima sektor keamanan (politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan). Ancaman yang paling mendesak adalah militer, yang mampu berpose terhadap ancaman negara pada beberapa tingkatan. ancaman militer dapat mempengaruhi semua komponen dalam negara yang dimasukan kedalam tugas besar sebuah negara untuk melindungi warganya yang memiliki efek buruk pada lapisan kepentingan sosial dan individu.<sup>23</sup> selain itu, ancaman politik merupakan perhatian konstan bagi negara, namun mereka ambigu dan sulit untuk mengidentifikasi dalam kaitanya dengan ancaman militer. Sebagai negara adalah entitas politik itu sendiri, sebuah ancaman politik dengan tujuan melemahkan entitas dapat dianggap setara dengan ancaman militer. Mereka bisa mengambil bentuk persaingan ideologi atau serangan terehadap bangsa sendiri. Sementara keamanan ekonomi dapat dianggap sebagai indikator kunci

---

21 Marianne Stone, Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis. Sciences Po – Paris, France Columbia University, School of International And Public Affairs – New York, Usa Hal.1

22 Marianne Stone, Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis. Sciences Po – Paris, France Columbia University, School of International And Public Affairs – New York, Usa Hal.2

23 Marianne Stone, Security According To Buzan: A Comprehensive Security Analysis. Sciences Po – Paris, France Columbia University, School Of International And Public Affairs – New York, Usa Hal. 4

untuk keamanan umum negara<sup>24</sup>

Barry Buzan menyatakan keamanan adalah fenomena rasional dimana seseorang tidak dapat memahami keamanan dari negara tertentu tanpa memahami pola internasional yang saling bergantungan. Selain itu konsep yang penting antara persahabatan dan permusuhan antara negara-negara mengadakan aliansi ditandai dengan adanya rasa takut. Isu-isu ini dipengaruhi oleh ideologi, wilayah, etnis dan preseden sejarah.<sup>25</sup>

Ancaman ideologi adalah salah satu ancaman keamanan nasional yang lebih besar dan lebih cepat pergeseranya dari pada keseimbangan kekuatan militer yang merupakan salah ancaman non-militer negara yang termasuk kedalam bagian unsur vital negara dengan alasan, *pertama* ideologi mampu memicu persepsi ancaman dan mempengaruhi kebijakan negara, dan yang *kedua* adalah negara itu sendiri terlibat kedalam keseimbangan ideasional dalam menanggapi ancaman ideologis.<sup>26</sup>

### **Adanya Kepentingan Arab Saudi Untuk Menekan Ancaman Syiah dan Mempertahankan Eksistensi Sunni di Bahrain**

Berdasarkan konstitusi 26 Mei 1973 terdapat empat bagian yang diatur dalam konstitusi pertama mengenai negara, konstituen dasar masyarakat, hak masyarakat dan tugas-tugasnya serta kekuasaan (powers). Menurut pasal 2 konstitusi 1973 Islam akan menjadi agama negara dan syariat Islam adalah sumber utama negara dari undang-undang. Keadilan mendasari sistem pemerintahan dan kewarganegaraan harus ditetapkan oleh hukum. Untuk sistem pemerintahan didasarkan pada pemisahan kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dan Yudisial yang berfungsi bekerjasma satu sama lain sesuai dengan ketentuan konstitusi. Amir adalah kepala pemerintahan yang kebal dan tidak dapat digangu.<sup>27</sup> Menurut data PBB 2013 total populasi Bahrain ada sekitar 1.314.089 yang terbagi atas 70.3% Muslim, 14.4% Kristen, 9.8% Budha dan 5.5% lainnya diisi oleh Yahudi. PBB menyatakan bahwa 55% populasi Bahrain adalah imigran Asia, Afrika, Eropa dan lainnya.<sup>28</sup>

---

24 Ibid, Hal 5

25 Ibid, Hal 6

26 Kaza Dan M. Saeri, Dukungan Arab Saudi Terhadap Kudeta Mesir Tahun 2013, Jurnal Hubungan Internasional Vol.5.No2 Februari 2014, Hal1042.

27 Constitution Of The State Of Bahrain, 26 Mai 1973 tersedia di <http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Bahrain.pdf> diakses [16 mai 2015]

28 CIA, The World Factbook Bahrain, tersedia <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html> diakses [17 mei 2015]

Keluarga Khalifa mermahzab Sunni memegang pemerintahan sejak kemerdekaan hingga sekarang. Terakhir kali laporan resmi pemerintah Bahrain pada masyarakat Sunni dan Syiah pada sensus pertama tahun 1941 adalah 53% dari total populasi, dimana populasi saat itu berjumlah 74.000. sementara menurut perkiraan dari forum Pew tentang agama dan umum yakni antara 65% sampai 75%.<sup>29</sup> Hal yang menjadi permasalahan di Bahrain adalah masalah Sektarian. berbeda dengan penguasa Sunni Teluk lainnya, Bahrain diperoleh melalui otoritas aliansi suku dan penaklukan yang dibantu oleh sekutu, suku yang berasal dari pusat Arab. bahkan sejak tahun 1961-1999 politik lokal Bahrain dapat disimpulkan sebagai kondominium Amir, Syeikh Isa bin Salman dan saudaranya Khalifa bin Salman dalam menghadapi perbedaan tajam fitur ideologis.<sup>30</sup>

Diskriminasi Syiah adalah sebuah fakta kehidupan yang terjadi di Bahrain. antara pemerintah dan oposisi, pejabat tinggi secara teratur muncul mencoba melemahkan persatuan oposisi dengan mengandarari baji antara Sunni dan Syiah. memang beberapa program reformasi mengurangi masalah *sektarian*. Seorang wartawan Bahrain ini bukan sesuatu yang mutlak “Sunni memiliki kekuatan nasional dan itu benar, tapi Syiah memiliki sektor komersial” namun hal ini dibantah oleh seorang mantan wakil presiden universitas Bahrain yang mengatakan bahwa crisis grup tidak ada diskriminasi dan tindakan keras pada kegiatan politik diarahkan kepada kedua grup, tetapi hanya Syiah yang mengeluh. Realitas diskriminasi formal dan informal sulit untuk diketahui dan dipengaruhi oleh beberapa isu yang masih melembagakan diskriminasi seperti bagian penting dari reformasi politik yang membantu memecahkan struktur Otoriter yang ironisnya menambah klaim pelembagaan diskriminasi dan contoh yang paling terkenal adalah persekongkolan daerah pemilihan parlemen untuk memastikan mayoritas perwakilan Sunni di parlemen meskipun status mereka minoritas. seperti pemilihan parlemen 2002.<sup>31</sup>

Selain itu dalam masalah naturalisasi politik pemerintah dikabarkan sedang mengejar kebijakan untuk mengubah keseimbangan demografis pulau, seperti pemberian kewarganegaraan non-Bahrain Arab terutama

29 Agnieszka Punzet, *Down To The Wiew In Bahrain: Last Chance For Real Political Reform, Policy Deparment, Belgium*: European Union 2012. Hal 12-13

30 Bahrain's Sectarian Challenge, Middle East Report N°40 – 6 May 2005 International Crisis Group Working To Prevent Conflict Worldwide, Tersedia Di [Http://Www.Crisisgroup.Org/~/media/files/middle%20east%20north%20africa/iran%20gulf/bahrain/bahrains%20sectarian%20challenge.pdf](http://www.crisisgroup.org/~/media/files/middle%20east%20north%20africa/iran%20gulf/bahrain/bahrains%20sectarian%20challenge.pdf) Diakses [17 Mai 2015] Hal 5

31 Ibid., Hal 7

Sunni dari seluruh wilyah untuk mengurangi dominasi Syiah. meskipun tidak ada angka yang jelas yang dipublikasikan untuk jumlah dalam naturalisasi politik namun beberapa menyarankan bahwa sekitar 50.000 sampai 60.000 kewarganegaraan diperpanjang dengan cara ini. selain itu, langkah-langkah yang luar biasa diambil adalah memberikan kewarganegaraan kepada Yordania, Suriah dan Yaman yang direkrut oleh layanan keamanan dan sebagian besar penduduk menganggap mereka sebagai tentara bayaran. Selain itu, pemerintahan memberikan kewarganegaraan kepada sebanyak 8.000 orang Saudi yang mengklaim afiliasi dengan suku Dawasir yang dulunya di Bahrain namun telah lama tinggal di Timur Arab Saudi yang mengunjungi Manama pada tahun 2004. sementara aktivis Syiah mengatakan perekrutan warga Dawasir di Timur Saudi tanpa harus mengorbankan kewarganegaraan Saudi mereka dan yang menambahkan kemarahan adalah naturalisasi Saudi dibawah kebilik suara pada pemilihan oktober 2002.<sup>32</sup>

Dalam pekerjaan pemerintah keluarga penguasa mengendalikan sektor publik terutama di sektor-sektor sensitif seperti angkatan pertahanan Bahrain (BDF) dan kementerian dalam negeri. sebuah laporan yang diajukan oleh Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain (BCHR) bahwa dari 572 pos publik tingkat tinggi warga Syiah hanya menduduki 101 pekerjaan saja yang mewakili 18% dari keseluruhan, sementara saat penelitian pada 47 pangkat mentri dan wakil menteri hanya 10 Syiah yang mewakili 21 % dari total keseluruhan termasuk dalam kementerian Kritis Interior, Urusan Asing, Pertahanan, Keamanan Dan Keadilan. Laporan ini diperkuat oleh klaim bahwa Syiah hanya mendominasi di beberapa kementerian seperti kementerian perindustrian dimana mereka dilaporkan hanya memiliki 50% dari posisi senior dan hal ini hampir semua rakyat Syiah Bahrain mengakui adanya diskriminasi dalam berbagai layanan keamanan terutama sejak peristiwa 1979 yang mengangkat isu loyalitas dan ancaman Khomeini. selain itu, sebagian besar pelamar Syiah untuk pada pasukan keamanan terus ditolak.<sup>33</sup> Smenetara dalam bidang perumahan dan pemilikan properti Syiah juga menuduh diskriminasi perumahan, sebagian besar tinggal di desa-desa miskin di pinggir kota Manama, sementara daerah perumahan besar di pulau itu, Riffa dicadangkan untuk keluarga kerajaan, sedangkan di Timur hanya terbuka untuk Sunni dan kabarnya syiah tidak hanya dilarang hidup di daerah itu, tetapi juga tidak diizinkan untuk memiliki tanah disana.

<sup>32</sup> Ibid., Hal 8

<sup>33</sup> Ibid.,

## Adanya Ancamanan Peningkatan Dominasi Syiah Melalui Krisis Politik Bahrain

Pada saat konflik dan krisis politik Bahrain adanya peningkatan dominasi Syiah di parlemen dan gerakan-gerakan yang menyerukan demonstrasi besar-besaran yang bertujuan untuk mengulingkan kekuasaan rezim Al-Khalifa. Perjuangan terhadap nilai-nilai, penuntutan status, penentangan kekuasaan bukanlah hal baru di Bahrain. Justru perjuangan menentang kekuasaan telah terjadi pasca kemardekaan. Pada tahun 1975 dikeluarkannya dekrit pembubaran majelis nasional untuk masa yang tidak ditentukan sebagai tanggapan pengunduran diri 15 orang anggota kabinet kerajaan. Sementara untuk melanjutkan roda pemerintahan Syaikh Isa bin Salman aktif secara pribadi serta dibantu oleh keluarganya dalam menjalankan pemerintahan. Sementara perdana menteri sekarang Syaikh Hamad bin Isa Al-Khalifa, anak dari Syaikh Isa menjabat sebagai menteri pertahanan.<sup>34</sup> Untuk menahan kelompok-kelompok intelektual yang memberikan dorongan reformasi politik dan sosial pasca pembubaran majelis nasional serta gerakan reformasi kiri, rezim pemerintahan Bahrain bergantung pada dua kontingen pasukan pemerintah yang terdiri dari 150.000 anggota yang dipimpin oleh *Amir* dalam mengendalikan demonstrasi dan kelompok radikal.<sup>35</sup> Meningkatnya intensitas krisis politik pasca revolusi Iran pada tahun 1979, serta dorongan keluhan ekonomi, sosial, diskriminasi Syiah, dan politik sayap kiri pemerintahan menginginkan reformasi dalam struktur pemerintahan.<sup>36</sup> Bahrain memanfaatkan hubungan luar negeri dengan mengandalkan kebijakan luar negeri pro-Barat, pro-Arab yang mengikuti jejak Arab Saudi. Dimana rezim pemerintahan Syaikh Isa menggunakan fasilitas pangkalan angkatan laut Inggris (Jubair) dan fasilitas yang diberikan Amerika Serikat untuk menangkal kelompok-kelompok radikal hingga wafat.<sup>37</sup>

Menggantikan kekuasaan ayahnya yang wafatnya pada Maret 1999, Syeikh Hamad bin Isa Al-Khalifa untuk meredakan ketengangan antara sekte (*Sunni vs Syiah*), *Amir* Hamad memenjarakan pembangkang Syiah dan mengadakan referendum piagam nasional pada tahun 2001 dan konstitusi baru untuk mendirikan monarki konstitusional

34 David E. Long Dan Bernard Reich, (Edior)*The Goverment And The Politics Of The Middle East And North Africa*, Colorado, Westview Press. 144

35 Ibid., Hal 144-145

36 Will Fulton, Ariel Farrar-Wellman, 2011 *Bahrain-Iran Foreign Relations*, Tersedia Di <Http://Www.Irantracker.Org/Foreign-Relations/Bahrain-Iran-Foreign-Relation>. Diakses[ 5 Maret 2015]

37 David E. Long Dan Bernard Reich, Opcit, . 146

yang menyerukan kesetaraan antara Sunni dan Syiah serta menjamin hak-hak sipil dan properti untuk semua warga negara.<sup>38</sup>

Tahun 2002 merupakan tahun pertama negara Bahrain mengadakan pemilihan umum. Krisis politik yang terjadi saat itu adalah aksi boikot pemilihan yang dilakukan oleh oposisi masyarakat politik Syiah *Al-Wifaq* dengan tidak mengambil bagian dalam pemilihan 2002 dengan alasan ukuran dewan *Shura* dan dewan perwakilan (COR) tidak mencairkan keinginan rakyat. Sementara pemilu-pemilu selanjutnya, semua masyarakat politik oposisi terjun dalam pemilu 2006 dan (*Al-Wifaq* memboikot pemilu pada putaran kedua) dengan alasan marjinalisasi mayoritas Syiah di negara itu.<sup>39</sup>

Sementara pada bulan Desember 2008, pra-pemilihan umum tahun 2010, pemerintah membuat banyak penangkapan demonstran Syiah dan menuduh beberapa orang yang menjadi bagian dari plot asing untuk mengacaukan Bahrain (destabilisasi). Beberapa dituduh telah menjalani gerilya atau pelatihan teroris di Suriah. Pada tanggal 26 Januari 2009, pemerintah menangkap tiga aktivis Syiah terkemuka, termasuk Dr. Abduljalil Alsingace dan Mr. Hassan Mushaima, kedua pimpinan Al Haq selama Februari-Maret 2009, mereka dibebaskan dan diampuni bersama aktivis Syiah lainnya pada bulan April. Alsingace mengunjungi Amerika Serikat beberapa kali untuk menyorot situasi hak asasi manusia di Bahrain. Alsingace ditangkap lagi pada bulan Agustus 2010 sementara Mushaima diasingkan ke Eropa dan ditangkap kembali pada tahun 2011, sehubungan dengan kerusuhan saat itu.<sup>40</sup>

---

38 Charles Gordon Smith, *Bahrain, Domestic And Foreign Relation Since Independence*, Tersedia Di [Http://Www.Britannica.Com/Ebchecked/Topic/49072/Bahrain/93662/Domestic-And-Foreign-Relations-Since-Independence](http://Www.Britannica.Com/Ebchecked/Topic/49072/Bahrain/93662/Domestic-And-Foreign-Relations-Since-Independence) Diakses [5 Maret 2015]

39 Bahrain Majlis Al Nuwab, In 2006, Tersedia Di [Http://Www.Ipu.Org/Parline-E/Reports/Arc/2371\\_06.Htm](Http://Www.Ipu.Org/Parline-E/Reports/Arc/2371_06.Htm) Diakses [15 Maret 2015]

40 Kenneth Katzman, *Bahrain: Reform, Security, And Us Policy*, Cornell University Ilr Scholl, 2-21-2012, Congressional Research Service, Hal 8 Tersedia Di [Http://Digitalcommons.Ilr.Cornell.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1901&Context=Key\\_Workplace](Http://Digitalcommons.Ilr.Cornell.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1901&Context=Key_Workplace) Hal 5

**Tabel 1: Perbandingan Majlis Nasional Bahrain Bedasarkan Sekte**

Kamar (Chamber)	Masyarakat Politik	Pemilihan Umum		
		Tahun 2006	Tahun 2010	Setelah Pemilihan Oktober 2011
Dewan Legislatif (Council Of Representative/ COR)  Dipilih berdasarkan pemilihan umum yang diadakan selama dua putaran.	1.Wifaq ( <i>Shitee Islamist</i> )	17	18	0
	2.Shitee Independent	0	0	8
	3.Sunni Independent ( <i>Mostly Secular</i> )	8	17	27
	4. Moderate Sunni Islamist ( <i>Minbar; Muslim Brotherhood</i> )	7	2	2
	5. Conservative Sunni ( <i>Asala, Salafi</i> )	8	3	3
Total hasil pemilihan COR berdasarkan sekte dari 40 Kursi Di COR		23 Sunni, 17 Syiah	22 Sunni, 18 Syiah	32 Sunni, 8 Syiah
Dewan Konsultasi ( <i>Shura Council</i> )  Ditunjuk/Dipilih Langsung Oleh Raja	Total Dari 40 Kursi Di Shura Council	19 Sunni, 19 Sunni, 1 Kristen	19 Sunni, 19 Syiah, 1 Yahudi	19 Sunni, 19 Syiah, 1 Yahudi

(Sumber: diolah dari IPU dan Kennezt Katzman)

Tabel di atas menjelaskan hasil pemilihan umum majelis nasional setiap empat tahun sekali pasca Referendum Piagam Nasional pada tahun 2001. Dari beberapa pemilihan umum yang diadakan, Bahrain dihadapkan dengan masalah reformasi pada sistem politik (kiris politik). Dewan Perwakilan Rakyat mengalami peningkatan yang tajam pada pemilihan pasca Oktober 2011, dimana Sunni memegang 32 kursi di majelis rendah, sementara untuk majelis tinggi, adanya perimbangan kekuasaan dan tidak ada perubahan.

Selain itu, masyarakat asosiasi oposisi utara Syiah *Al-Wifaq* yang merupakan masyarakat politik oposisi terbesar di Bahrain. Kebanyakan pemimpin *Wifaq* diasingkan setelah kerusuhan tahun 1990-an dan melanjutkan kegiatan oposisi di London. Sementara dengan amnesti

2001 mereka kembali ke Bahrain dan mendirikan asosiasi masyarakat politik. Kekuatan masyarakat asosiasi Syiah Wifaq mulai mendominasi dan aktif menekan pemerintah sejak tahun 2002. Pada pemilihan pertama *Al Wifaq* tahun 2002 partai *Al-Wifaq* memboikot pemilihan parlemen. Memboikot pemilihan putaran kedua pada pemilihan 2006, dan mengajukan tuntutan atas pemilu terkait kecurangan pemilu pada tahun 2010 serta mengundurkan diri pada saat krisis politik pada 2011.

Masyarakat asosiasi Syiah Wifaq merupakan asosiasi yang sering menuntut hak di parlemen dan bekerja memerangi diskriminasi yang dirasakan oleh pemerintah yang didominasi Sunni melalui perundang-undangan. Wifaq memperkuat posisinya diparlemen sebagai politik terkemuka di komunitas Syiah yang mendukung demonstrasi damai.<sup>41</sup> Sementara Sheikh Isa Qassim, yang merupakan ulama populer di Bahrain yang mengaku menghindari politik tapi secara pribadi mendukung dan mungkin memiliki pengaruh yang cukup besar di atasnya.<sup>42</sup> Meskipun dampak konflik bahrain terbilang sedikit tetapi tekanan terhadap pemerintah lebih besar karena mayoritas dari masyarakat Bahrain adalah Syiah.

### **Terancamnya Rezim Pemerintahan Sunni Bahrain Yang Merupakan Sekutu Penting Arab Saudi di Kawasan Teluk**

Konflik yang terjadi pada tahun 2011 adalah pemberontakan dunia Arab atau yang lebih dikenal Arab spring. Pada tanggal 14 Februari 2011 para pengunjuk rasa menduduki *Pearl Roundabout* dan ini dikenal sebagai *Lulu Roundabout*. Awalnya ini bukan merupakan protes sektarian justru ini adalah panggilan reformasi politik dan desentralisasi di parlemen yang secara lansung menghindari kritikan terhadap raja Hamad. Dalam upaya mengakhiri protes aparat keamanan menyerang markas oposisi, menghancurkan struktur agama Syiah tanpa izin dan menghancurkan sedikitnya 38 mesjid Syiah.<sup>43</sup> Namun yang menjadi ancaman yang lebih besar terhadap pemerintahan Hamad adalah ulama Syiah menulis surat kepada Khameini untuk membantu pendukuk Syiah Bahrain, surat itu di tanda tangani oleh pengikut Ayatullah Khameini di Bahrain dan dipublikasikan secara luas di media.<sup>44</sup>

41 Us Embassy Cables: Guide To Bahrain's Politics, Tersedia Di [Http://Www.Theguardian.Com/World/Us-Embassy-Cables-Documents/168471](http://Www.Theguardian.Com/World/Us-Embassy-Cables-Documents/168471) Diakses 14 Maret2015

42 Ibid.

43 Simon Mabon 2012, The Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry Summer, Journal Essay Volume XIX, Number 2. Hal 5

44 Ibid., Hal 5

Buntut dari peristiwa konflik yang terjadi pada Februari dan Maret 2011 berdasarkan laporan dari Profesor Cherif Bassiouni (ahli hak asasi manusia Mesir-Amerika) secara menyeluruh termasuk wawancara lebih dari 5000 saksi secara rinci menjelaskan 35 orang kematian termasuk demonstran, selain itu 4400 orang dilaporkan dipecat dari pekerjaanya baik disektor publik maupun swasta. Laporan yang diterbitkan Cherif Bassimouni berisi ancaman dari pasukan pemerintah untuk menggunakan kekuatan yang berlebihan dan menahan pengunjuk rasa ilegal dan penyiksaan adalah praktek yang disengaja yang digunakan oleh beberapa agensi pemerintahan.<sup>45</sup>

Pecahnya konflik pada Februari dan Maret 2011, 18 orang angota parlemen mengundurkan diri. Dewan perwakilan (*council of representatif*) mayoritas didominasi oleh masyarakat politik Syiah *Al-Wifaq* tidak terima dengan sikap pemerintah menanggapi para demonstran pada 17 Februari 2011 dan akan kembali hanya ketika raja setuju untuk mengubah bangsa menjadi demokrasi konstitusional dengan pemerintahan terpilih.<sup>46</sup>

Meningkatnya tekanan terhadap pemerintah dengan lahirnya kelompok-kelompok pro-revolusi yang diidentifikasi sebagai gerakan-gerakan Syiah, sektarian dan pro-Iran oleh *The Gathering Of National Unity* (TGONU), yang dipimpin oleh Dr. Abdellatif Al Mahmood yakni sebuah gerakan payung bagi sejumlah kelompok Sunni lainnya, termasuk *Al-Asalah* (Partai Salafi) dan *Al-Menbar* (Ikhwanul Muslimin) dan beberapa sekuler lainnya, mereka mengkritik *Al-Wifaq* atas kejadian 14 Februari yang mereka lihat sebagai kekerasan, sektarian dan pro-Iran. Mereka juga menyerukan *Al-Wifaq* untuk minta maaf atas tindakan kekerasan yang dilakukan demonstran sebagai prekursor untuk setiap dialog.<sup>47</sup>

Selain itu lahirnya Koalisi pemuda 14 Februari yang merupakan jaringan politik anonim dan desentralisasi yang telah dikoordinasikan pada bulan aktivisme dan protes 14 Februari 2011 yang mengupayakan perjuangan mereka lewat media sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Koalisi pemuda 14 Februari adalah orang-orang revolusioner yang berdiri kokoh pada percikan revolusi populer 14 Februari 2011. Hubungannya dengan masyarakat oposisi utama *Al-Wifaq* didasarkan pada prinsip menghormati dan menganggap mereka tidak terpisahkan

45 Ibid., Hal 6

46 *Al Wifaq National Islamic Society*, Tersedia Di [Http://Www.Globalsecurity.Org/Military/World/Gulf/Bahrain-Politics-Parties-Wifaq.Htm](http://Www.Globalsecurity.Org/Military/World/Gulf/Bahrain-Politics-Parties-Wifaq.Htm) Diakses [22 Februari 2015]

47 Jane Kinninmont, Juni 2012, Bahrain; Beyond The Impasse, Chatham House, The Royal Institute Of International Affair Hal 8

dalam perjuangan. Sedangkan ketika ditanya dengan *Al Haq*, *Al Wafa*, mereka menjawab bahwa tujuannya sama dengan tujuan kelompok oposisi yakni revolusi, dengan cara mengambil keuntungan dari semua keahlian dan pendapat untuk merapatkan barisan untuk melawan rezim.<sup>48</sup>

Tujuan dari organisasi koalisi pemuda 14 Februari digariskan dalam *Pearl Charter* berupa:<sup>49</sup>

1. Misi menggulingkan rezim suku Al-Khalifa yang telah kehilangan legitimasinya dan membawa kepala dan pejabat ke pengadilan, termasuk diktator Hamad, untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan terhadap rakyat.
2. Memastikan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan kemampuan untuk memilih sistem politik yang memenuhi ambisi dan aspirasi mereka.
3. Membongkar lembaga keamanan negara saat ini dan membangun kembali mereka disepanjang standar modern yang menjamin keselamatan dan keamanan bagi semua warga negara.
4. Membentuk peradilan yang independen dan adil.
5. Memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif).
6. Menjaga persatuan nasional, menjaga struktur sosial, keadilan dan kesetaraan, serta melarang segala bentuk diskriminasi terhadap warga negara.
7. Mencari solusi yang realistik dan adil untuk masalah naturalisasi politik sistematis yang telah dibuat oleh rezim untuk mengubah identitas asli dan demografi negara.
8. Melestarikan identitas Islam dan Arab Bahrain.
9. Membentuk badan nasional untuk mengawasi pemilihan Majelis Konstituante yang akan menyusun konstitusi baru bagi negara itu setelah jatuhnya rezim Al-Khalifa.
10. Memastikan distribusi yang adil dari kekayaan sekaligus melindungi sumber daya nasional dan keuntungan bagi generasi mendatang.

Kelompok koalisi pemuda 14 Februari adalah kelompok-kelompok yang menginginkan penggulingan rezim pemerintahan rezim Hamad bin Isa Al-Khalifa (kudeta) serta menginginkan demokrasi konstitusional yang menyerukan gerakan-gerakan protes terhadap rezim pemerintahan

48 Toby C. Jones, Bahrain's Revolutionaries Speak: An Exclusive Interview With Bahrain's Coalition Of February 14th Youth, Tersedia Di [Http://Www.Jadaliyya.Com/Pages/Index/4777/Bahrains-Revolutionaries-Speak\\_An-Exclusive-Interv](http://Www.Jadaliyya.Com/Pages/Index/4777/Bahrains-Revolutionaries-Speak_An-Exclusive-Interv) [Diakses 15 Maret 2015]

49 Ibid.,

yang selalu eksis melakukan aksi-aksi demonstrasi. Kelompok ini mendukung setiap kelompok oposisi yang mendorong kejatuhan rezim Hamad bin Isa Al-Khlaifa termasuk seluruh asosiasi masayarakat Syiah Bahrain.

Jika kelompok revolusioner berhasil menumbangkan rezim pemerintahan Hamad bin Isa Al-Khalifa maka sistem pemerintahan akan berubah dari Monarki Konstituasinal ke Demokrasi Konstitusinal seperti yang diinginkan oleh gerakan-gerakan Revolusioner. Asas dari Demokrasi Konstitusional adalah pemilihan secara demokratis pemimpin negara yang memberikan peluang besar rezim pemerintahan Bahrain dipimpin oleh orang-orang Syiah. Kepemimpinan Syiah secara jelas akan menpengaruhi arah politik luar negeri Bahrain yang lebih mengarah pada pro-Iran yang merupakan rivalitas Arab Saudi.

### Ancaman Iran: Pengaruh Dan Keamanan di Bahrain

Pasca demonstrasi 14 Februari 2011 pejabat Iran meminta pemerintah Bahrain untuk menghormati hak-hak demonstran. Selain menanggapi dengan sikap yang bernada provokatif dari pernyataan anggota parlemen Iran juga mengutuk setiap tindakan pemerintahan Bahrain dalam menggunakan kekerasan untuk menekan protes kejam anti-rezim diawal bulan Februari 2011. Selain mengutuk kementerian luar negeri Iran juga meminta pemerintah Bahrain untuk menahan diri dan mencari bantuan asing untuk memadamkan kerusuhan internal dan menegaskan bahwa demonstrasi damai di Bahrain adalah salah satu isu domestik dan menggunakan kekuatan militer negara-negara lain untuk menindas tuntutan bukanlah solusi. Terkait masuknya intervensi Arab Saudi di Bahrain, juru bicara kementerian luar negeri Iran, Ramin Mehmanparast, menyatakan bahwa kehadiran pasukan asing dan campur tangan dalam urusan internal di Bahrain tidak dapat diterima dan akan memperumit masalah. Presiden Mahmoud Ahmadinejad menyatakan bahwa ukuran dan ruang lingkup demonstrasi di Bahrain memaksa kepemimpinan Bahrain untuk mengatasi masalah dari para pengunjuk rasa.<sup>50</sup>

Brondon mengatakan bahwa Arab Saudi bagaikan melihat hantu, Ayatollah Khameinei saat peristiwa Februari dan Maret 2011, dimana mereka percaya bahwa saat peristiwa Iran mengeksplorasi dan menekan Bahrain, dengan menggunakan *cover* pemberontakan

<sup>50</sup> Will Fulton, Ariel Farrar-Wellman, 2011 *Bahrain-Iran Foreign Relations, Terse-dia Di [Http://Www.Irantracker.Org/Foreign-Relations/Bahrain-Iran-Foreign-Relation](http://Www.Irantracker.Org/Foreign-Relations/Bahrain-Iran-Foreign-Relation). Diakses/ 5 Maret 2015]*

dimana-mana, termasuk pada keluarga Sunni Khalifa yang memegang kekuasaan Bahrain. Dengan banyaknya populasi mengisi wilayah-wilayah Teluk lainnya, Saudi Arabia melihat proses Syiah minoritas seperti memori “*Intifada Of Muharram 1400*” pada tanggal 28 November 1979 ketika 90.000 Syiah di provinsi Qatif bagian Timur Arab Saudi melakukan protes dengan memegang gambar Ayatollah Khameinei dan kecemasannya atas slogan anti-Saudi.<sup>51</sup>

Dalam kutipan pidato yang disampaika Mengapa Barat Sangat Sekular dan Liberal? (Azhari Setiawan) n di Whashington DC terlihat kekhawatiran Pangeran Turki Al-Saud, akan kecemasan Arab Saudi terhadap rencana-rencana Iran di Bahrain, kekhawatiran kehancuran instalasi gedung kedutaan Arab Saudi termasuk jembatan *King Fadh Causeaway*. Selain kekhawatiran terhadap nuklir Iran, ia mengecam campur tangan Iran dalam masalah internal Arab Saudi, serta beranggapan bahwa Iran juga mendanai entitas non-negara seperti *Hizbullah* serta aksi teroris di Bahrain.

Bahrain adalah titik *hotspot* persaingan antara ideologi *Sunni* dan *Syiah*. Arab Saudi menyatakan sebagai pemimpin Sunni, sedangkan Iran sebagai pemimpin Syiah. Meskipun perang ideologi telah berlangsung sejak lama, namun pada akhir-akhir ini mulai bangkit dengan adanya narasi-narasi oleh para petinggi pemegang kekuasaan. Kawasan Teluk rentan akan agresi militer dan perang. Pada tahun 1990-an hingga 2011, mulai dari invansi Irak ke Kuwait, perang Irak-Iran kawasan Teluk Persia selalu menjadi medan perang antara negara yang mempengaruhi stabilitas harga minyak dunia. Kontra dan persaingan antar mahzab akan berpotensi mempengaruhi keamanan kawasan.

**Tabel 2: Komposisi Mahzab Syiah di Kawasan Teluk**

Negara Teluk	Total sekte Syiah
Bahrain	65-75%
Kuwait	20-25%
Arab Saudi	10-15%
Oman	5-10%
Qatar	< 10%
UEA	< 10%

(Sumber: Justin Gengler<sup>52</sup>)

51 Brandon Friedman, Battle For Bahrain: What One Uprising Meant For The Guls State And Iran, Tersedia Di [Http://Www.Worldaffairsjournal.Org/Article/Battle-Bahrain-What-One-Uprising-Meant-Gulf-States-And-Iran](http://Www.Worldaffairsjournal.Org/Article/Battle-Bahrain-What-One-Uprising-Meant-Gulf-States-And-Iran) Diakses [25 Maret 2015]

52 Justin J. Gengler, 2011. Ethnic Conflict And Political Mobilization In Bahrain And The Arab Gulf, The University Of Michigan Hal 118.

Jika dilihat dari tabel, Bahrain berada di tingkat paling atas populasi mahzab Syiah di kawasan Teluk dibandingkan dengan keseluruhan total populasi. Namun jika dikalkulasikan, kuantitas Syiah di Arab Saudi lebih besar dari total penduduk Syiah Bahrain yakni sekitar 3.418.248 jiwa, sementara Bahrain hanya 985.567 jiwa (total populasi dikalkulasikan dengan demografi penduduk berdasarkan religius). Jika revolusi Syiah Bahrain berhasil maka akan berpotensi mengancam integritas kesatuan Arab Saudi dengan alasan bahwa Syiah Arab Saudi memberikan tekanan yang besar bagi kelangsungan integritas saudi apalagi Syiah di Arab Saudi berada pada titik-titik strategis jantung perekonomian Arab Saudi.

Sebagaimana banyak pendapat ilmuan yang mengkaji Timur Tengah, terkhususnya konflik Bahrain seperti *Jane Kinnimont*, Toby, March Lynch, *Omar* dan lainya berpendapat bahwa pemerintahan Bahrain berusaha mempertahankan *status quo* dengan menekan pihak oposisi dan para demonstran untuk mencegah timbulnya perimbangan kekuasaan antara divisi sekte di parlemen. Dalam beberapa kasus terindikasi bahwasanya keluarga Al-Khalifa menahan dan menunda dialog nasional serta membentuk dan mengeluarkan putusan dengan alasan keamanan nasional.

Jika dilihat ulang dari krisis-krisis politik sebelumnya yang terjadi di Bahrain, bahwasanya penguasa berusaha mengimbangi dominan kekuatan masyarakat politik Syiah dengan melakukan naturalisasi warga negara asing. Sementara Justin Gengler menjabarkan bahwa pemberontakan Bahrain adalah konspirasi yang melibatkan Iran dengan dukungan dari Amerika Serikat. Sebagaimana menteri pertahanan sekaligus panglima angkatan bersenjata Bahrain, Marshall Khalifa bin Ahmad Al-Khalifa, mengutuk tindakan Amerika bermuka dua di Bahrain dan informasi dimuat diforum Salafi militan, pembacanya diminta untuk mengambil tindakan atas operasi hizbullah. Namun di berita lain dilaporkan bahwa pemerintah ramah Sunni dikepung oleh masyarakat Syiah pro-Iran.<sup>53</sup>

Sherif Elashmawy dalam “*The Foreign Policies of Saudi Arabia and Qatar Towards The Arab Uprisings: The Cases of Egypt, Libya And Bahrain*” mengatakan bahwasanya respon Arab Saudi terhadap aksi protes di Bahrain mencerminkan bagaimana penguasa Saudi waspada terhadap protes Bahrain, disatu sisi potensi keberhasilan pemberontakan

53 Justin Gengler, *Other Side Radicalization In Bahrain*, 15 Juli 2011, Tersedia Di <Http://Foreignpolicy.Com/2011/07/15/The-Other-Side-Of-Radicalization-In-Bahrain/> Diakses [25 Maret 2015]

Bahrain akan menjadi ancaman besar kepada keberlangsungan rezim Saudi. Disisi lain, keberhasilan tersebut akan mengubah keseimbangan regional di kawasan Teluk dan akan melemahkan posisi Riyadh dan menguntungkan bagi rivalitasnya. Sedangkan konsekuensi untuk sisi internalnya, provinsi Timur yang terpadat dari golongan Syiah, mulai melakukan protes dan menyebar di kawasan tersebut pada pertengahan Februari yang protetangga di Bahrain dan didukung oleh ulama Syiah yang berpengaruh seperti Nimr al-Nimr.<sup>54</sup>

Robert Mason dalam “*The Gradual Tilt To Asia*” menjelaskan bahwa:<sup>55</sup> dalam mengatasi dan mencegah ancaman regional, Arab Saudi mengkonsolidasikan dan mengkristal membagi sektarian untuk mengisolasi pengaruh Iran dengan memfasilitasi aliansi negara peripheri. Selain itu Arab Saudi mengkonsolidasikan pelembagaan GCC.<sup>56</sup>

Potensi dampak pembentukan demokrasi di Bahrain adalah menghapuskan pangkalan militer Amerika Serikat dan perubahan skema kerjasama negara Teluk (GCC) yang mengurangi pertahanan keamanan dan kerjasama keamanan di kawasan Teluk. Sebaliknya untuk menciptakan keamanan di kawasan Teluk Persia, Bahrain menyediakan bagian dari wilayahnya untuk penempatan pangkalan militer Amerika Serikat, navy’s ke-lima di Pelabuhan Salman selama bertahun-tahun. Selain itu, sejak pemisahan Bahrain dan Iran, pemerintahan Bahrain bergabung dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat menggunakan tangan besi untuk mengatur populasi suku penduduk yang bertujuan untuk menghapus kekhawatiran tentang pengulingan keluarga Al-Khalifa.<sup>57</sup> Selain itu, keruntuhan rezim Hamad Bin Isa Al-khalifa akan merubah peta politik dan keseimbangan kawasan Timur Tengah dengan dalih aneksasi wilayah Bahrain oleh Iran.

---

54 Sherif Elashmawy , *The Foreign Policies Of Saudi Arabia And Qatar Towards The Arab Up-risings The Cases Of Egypt, Libya And Bahrain* , University Of Innsbruck 2014. , Sciences Po Paris

55 Robert Mason , “*The Gradual Tilt To Asia: Cause For Re-Defining Saudi Arabia's Regional Environment?*” Tersedia Di <Http://Www.E-Ir.Info/2012/10/03/The-Gradual-Tilt-To-Asia-Cause-For-Re-Defining-Saudi-Arabias-Regional-Environment/> Diakses [ 2 Maret 2015]

56 Robert Mason , “*The Gradual Tilt To Asia: Cause For Re-Defining Saudi Arabia's Regional Environment?*” Tersedia Di <Http://Www.E-Ir.Info/2012/10/03/The-Gradual-Tilt-To-Asia-Cause-For-Re-Defining-Saudi-Arabias-Regional-Environment/> Diakses [ 2 Maret 2015]

57 Hosyen Ala'i, *Proposed Bahrain-Saudi Union To Proteck Regional Monarchies-Iran Anal-isys*,Teresedia Di, [Http://Www.Biyokulule.Com/View\\_Content.Php?Articleid=6074](Http://Www.Biyokulule.Com/View_Content.Php?Articleid=6074) [Diakses 6 Maret 2015]

## Dukungan Arab Saudi Terhadap Rezim Pemerintahan Hamad Bin Isa Al Khalifa di Bahrain pada tahun 2011-2014

### a. Bantuan Ekonomi melalui GCC (*Gulf Cooperation Council*)

Menteri luar negeri Arab Saudi menyimpulkan bahwa GCC menyediakan dukungan untuk Bahrain dan Oman sebesar USD 20 miliar dengan janji USD 2 miliar untuk paket dukungan ekonomi lebih dari 10 tahun sementara masing-masing negara akan menerima USD 10 miliar untuk pembangunan ekonomi.<sup>58</sup> Program bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial serta standar hidup di kedua negara serta menyediakan perumahan kepada yang membutuhkan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pelayanan publik. Selain kedua negara termasuk negara termiskin di kawasan Teluk, rencana ini juga untuk membantu negara Bahrain dan Oman yang dilanda kerusuhan.<sup>59</sup>

Bentuk dukungan ekonomi Arab Saudi terhadap Bahrain lebih lanjut adalah penandatanganan enam perjanjian *Saudi Fund For Development* dengan Bahrain sebagai bentuk pembangunan ekonomi. Pangeran Salman bin Hamad Al-Khalifa memuji dukungan GCC ke Bahrain dengan dukungan Arab Saudi dibawah kepemimpinan Raja Abdullah.<sup>60</sup> Arab Saudi dan Bahrain menyetujui pembangunan pusat dialisis dan pembangunan pusat perawatan, sebagaimana *Saudi Fund for Development* (SFD) telah menandatangani dua perjanjian di bidang kesehatan dengan Bahrain di Manama pada tanggal 24 Maret 2014.

Perjanjian pertama adalah untuk pembentukan pusat dialisis di Riffa dengan biaya US\$ 21 juta, sedangkan perjanjian kedua akan mendanai pembangunan pusat perawatan jangka panjang di Muharraq dengan biaya US\$ 37 juta. Yang ditandatangani oleh wakil presiden dan manajer direktur Yousef bin Ibrahim Al-Bassam (SFD) untuk sisi Saudi, sementara Menteri Keuangan, Sheikh Ahmad bin Muhammad Al-Khalifa, mewakili sisi Bahrain, sebagai hasil kesepakatan Bahrain dan Saudi di penghujung tahun 2012.<sup>61</sup>

58 Saudi Arabia In Fokus Infokus 15 Maret 2011, Tersedia Di [Http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2011/11-Focus-03-15.Pdf](http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2011/11-Focus-03-15.Pdf) Diakses [15 Maret 2015]

59 Kuwait City (Afp) Gulf States To Aid Unrest-Hit Bahrain, Oman: Report, Rabu, 02 Maret 2011, Tersedia Di <Http://Www.Alarabiya.Net/Articles/2011/03/02/139877.Html> Diakses [20 April 2015]

60 Mahmoud Rafique, Bahrain Inks Six Agreements With Gcc Marshall Plan, 24x7 News 31 Desember 2012. Tersedia Di <Http://Www.Twentyfoursevennews.Com/Bahrain-News/Bahrain-Inks-Six-Agreements-With-Gcc-Marshall-Plan/> Diakses [15 April 205]

61 Saudi Arabia Infokus 25 Maret 2014. Tersedia Di <Http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2014/14-Focus-03-25.Pdf> Diakses 15 Maret 2015

**b. Bantuan Keamanan melalui Intervensi Militer GCC dibawah Komando Pangeran Nayef Bin Abdulaziz Al-Saud**

Setelah negara-negara GCC mengadakan konferensi tingkat tinggi pada 16 Februari 2011, Raja Hamad mengunjungi Arab Saudi 23 Februari 2011 untuk konsultasi mengenai bagaimana kebijakan menangani kerusuhan, sedangkan Putra Mahkota, Salman, mengunjungi Uni Emirat Arab pada 2 Maret 2011. Ketika protes meningkat pada 1 Maret 2011, demonstran memblokir pintu masuk ke gedung parlemen sehingga mengakibatkan penundaan selama 6 jam. Protes juga mulai memicu bentrokan antara Sunni-Syiah, dimana beberapa Bahrain percaya bahwa konflik telah masuk kedalam konflik *sectarian*. Pada 13 Maret pengunjuk rasa memblokade distrik keuangan ibukota Manama, yang mengkhawatirkan pemerintah kerusuhan akan mendesak sektor ekonomi.<sup>62</sup>

Intervensi militer GCC di yang dipelopori oleh Arab Saudi di bawah komando Pangeran Nayef Bin Abdulaziz Al-Saud. Pada saat intensitas konflik memuncak pada pertengahan Maret 2011, atas permintaan rezim pemerintahan Bahrain, Arab Saudi mengirimkan 1.200 pasukan keamanan termasuk (20 tank dan kendaraan lapis baja) pada tanggal 14 Maret. Dan pasukan keamanan Arab Saudi bersama 600 polisi UEA menyeberang ke Bahrain dan mengambil posisi lokasi-lokasi kunci di sekitar Manama. Sementara Kuwait mengirimkan angkatan laut untuk mengamankan perbatasan maritimnya. Dan pada tanggal 15 Maret, Raja Hamad mengumumkan status tiga bulan keadaan darurat yang dipimpin oleh Kepala Staff BDF (*Bahrain Defence Force*), Khalifa bin Ahmad al-Khalifa. Bersama pasukan Bahrain, penyebaran GCC membersihkan demonstran di *Pearl Raundabaout* (menghancurkan monumen Mutiara pada 18 Maret). Sementara pasca intervensi GCC, kelompok HAM bersaksi pada 13 Mei 2011 di sidang Tom Lantos komisi hak asasi manusia, melaporkan lebih dari 1500-2600 orang telah diberhentikan dari pekerjaan mereka, dan 30 pengunjukrasa meninggal. Sementara beberapa tokoh oposisi mengatakan 30 mesjid Syiah dibulldoser untuk mencegah perkumpulan-perkumpulan Syiah dan beberapa akun mengatakan ada keterlibatan GCC dan beberapa pengamat berpendapat bahwa GCC berpartisipasi secara langsung untuk menekan protes dengan menjaga lokasi-lokasi kunci dan infrastuktur penting.<sup>63</sup>

62 Kenneth Katzman, Bahrain: *Reform, Security, And Us Policy*, Cornell University Ilr Scholl, 2-21-2012, Congressional Research Service, Hal 8 Tersedia Di [Http://Digitalcommons.Ilr.Cornell.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1901&Context=Key\\_Workplace](Http://Digitalcommons.Ilr.Cornell.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1901&Context=Key_Workplace) Diakses [15 April 2015]

63 Ibid.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Saud Al-Faisal, pada sidang dewan menteri GCC ke-120 13 September 2011, yang dihadiri menteri luar negeri Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Maroko dan Yordania, menegaskan kembali komitmennya untuk stabilitas dan keamanan Bahrain dan dukungan diungkapkan untuk langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan pemerintah. Para menteri luar negeri menyambut pemilu yang dijadwalkan di Bahrain akhir bulan itu, yang akan memberikan kontribusi pada proses reformasi, serta sebagai peluncuran Dialog Konsensus Nasional dan pembentukan pencari fakta komisi independen.<sup>64</sup> Pada November 2011, Raja Hamad bin Isa Al Khalifa menerima hasil laporan dari tim penyelidik panel ahli hak asasi manusia yakni komisi independen penyelidikan Bahrain atau *The Bahrain Independet Commision Of Inquiry* (BICI) yang dipimpin oleh Cherif Bassiouni, yang bersedia untuk melakukan reformasi dan melakukan dialog dengan kelompok oposisi.<sup>65</sup>

Ronal E. Neuman dalam *Bahrain: A Very Complicated Little Island* beranggapan Sementara bantuan GCC akan tetap bertahan, kekerasan untuk mencegah investasi asing tidak akan dapat menghasilkan pekerjaan untuk menawarkan masa depan Bahrain, ketidakpercayaan besar antara oposisi dan pemerintah, perpecahan komunal yang mendalam antara keluarga kerajaan dan oposisi akan mempersulit kompromi, sementara media internasional mendiskreditkan pemerintah dan keluarga kerajaan.<sup>66</sup> Didalam negeri pihak oposisi menuntut turun rezim pemerintahan Hamad bin Al Khalifa, sementara diluar negeri, pejabat keamanan Bahrain dinilai melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Ditambah lagi pemerintahan Bahrain meminta bantuan negara Arab Saudi dan negara Teluk lainnya untuk membantu keamanan di Bahrain.<sup>67</sup>

Pemerintah Bahrain meminta bantuan kepada negara dewan kerjasama Teluk untuk meredam dan membendung unjuk rasa yang mulai meningkat. Dan pasukan GCC akan digunakan untuk menjaga sejumlah fasilitas strategis seperti minyak, listrik, instalasi air serta

64 Foreing Relations, Saudi Arabia Infokus 13 September 2011, Tersedia Di <Http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2011/11-Focus-09-13.Pdf>

65 Lars Estew, Loc.Cit.

66 Ronald E. Neumann, *Bahrain: A Very Complicated Little Island*, Winter 2013, Volume Xx, Number 4, Tersedia Di <Http://Www.Mepc.Org/Journal/Middle-East-Policy-Archives/Bahrain-Very-Complicated-Little-Island?Print> Diakses [4 April 2015]

67 House Of Commons, The Uk's Relations With Saudi Arabia Dan Bahrain: Fifth Report Of Seseion 2013-14 Vol 1. London : The Stationary Office Limited, 2013 Hal 73.

fasilitas perbankan dan finansial lainnya.<sup>68</sup> selain itu, Pangeran Saud menegaskan kembali komitmen Kerajaan untuk stabilitas dan keamanan Bahrain, yang merupakan bagian integral dari stabilitas dan keamanan Arab Saudi.<sup>69</sup>

Pengamat mengatakan bahwa intervensi pasukan GCC, yang dipimpin oleh Arab Saudi, di Bahrain untuk mengakhiri protes Syiah yang dipimpin Amerika di kerajaan kecil, cocok ke dalam strategi kontra Saudi bertujuan untuk menjamin stabilitas internal sendiri dan mempertahankan posisi regional, melihat pentingnya Bahrain untuk stabilitas internal Arab Saudi, pemerintah Saudi selalu berurusan dengan Bahrain sebagai urusan domestik dengan indikatif bahwa keputusan untuk mengirim pasukan ke Bahrain, di bawah naungan GCC, dipelopori oleh Menteri Dalam Negeri, Pangeran Nayef Ben Abdelaziz, dan bukan oleh menteri luar negeri atau menteri pertahanan.<sup>70</sup>

Pada tanggal 15 Maret 2011 raja Hamad mengumumkan tiga bulan keadaan darurat yang dipimpin oleh kepala staff BDF Khalifa bin Ahmad Al Khalifa. Beberapa kematian pengunjuk rasa dalam hubungannya, tujuh orang pemimpin Syiah dilaporkan kembali ditangkap, termasuk Mushaima AL-Haq, sisanya menteri Syiah di kabinet. Sementara banyak kaum Syiah di dewan Shura dan posisi senior lainnya di lembaga peradilan ditangguhkan dari pekerjaan mereka di pemerintah dan ada yang mengundurkan diri secara langsung, dan beberapa mengingatkan bahwa intervensi Saudi akan mendorong konflik yang lebih luas dengan mendorong intervensi Iran.<sup>71</sup>

Arab Saudi mengirimkan pasukan keamanan ke Bahrain untuk melindungi tempat-tempat strategis, serta memadamkan pemberontakan dan ketengen antara keluarga penguasa Sunni dan demonstran Syiah atas dasar permohonan permintaan bantuan dari negeri tetangga yang telah mengalami demonstrasi selama dua bulan belakangan. Dimana mayoritas Syiah Bahrain telah mengepung pusat ibukota Manama

68 Egidius Patnistik, Editor, *Bahrain Minta Diintervensi*, Kompas Tersedia Di <[Http://Entertainment.Kompas.Com/Read/2011/03/15/0322075/Bahrain.Minta.Diintervensi](http://Entertainment.Kompas.Com/Read/2011/03/15/0322075/Bahrain.Minta.Diintervensi)> [Diakses 25 November 2014]

69 Saudi Arabiainfokus 22 Maret 201. Tersedia Di [Http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2011/11-Focus-03-22.Pdf](http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2011/11-Focus-03-22.Pdf) Diakses [15 Maret 2015]

70 Sherif Elashmawy , The Foreign Policies Of Saudi Arabia And Qatar Towards The Arab Uprisings The Cases Of Egypt, Libya And Bahrain , University Of Innsbruck 2014, Sciences Po Paris. Hal.12

71 Kenneth Katzman, Bahrain: *Reform, Security, And Us Policy*, Cornell University Ilr Scholl, 2-21-2012, Congressional Research Service, Hal 8 Tersedia Di [Http://Digitalcommons.Ilr.Cornell.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1901&Context=Key\\_Workplace](http://Digitalcommons.Ilr.Cornell.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1901&Context=Key_Workplace) Diakses [15 April 2015]

sejak 15 Februari hingga pertengahan Maret 2011 berbaris di depan gedung-gedung pemerintahan dan istana. Yang menjadi fokus tempat protes adalah bundaran Mutiara di pusat ibukota, dimana puluhan ribu demonstran siap untuk konfrontasi. Riyadh mengatakan bahwa mereka telah menanggapi ancaman keamanan dengan mengerahkan pasukan ke jalan-jalan tetangganya, mereka melindungi tempat-tempat strategis seperti jembatan, gedung pemerintah. Sedangkan tanggapan penguasa Bahrain, mengatakan bahwa pasukan Saudi melintasi 16 mil dari jembatan yang menghubungkan ke pulau bersama kontingen pasukan dewan kerjasama Teluk sebagaimana yang di beritakan di *The Guardian*, “*Saudi Arabian troops enter Bahrain as regime asks for help to quell uprising*”.<sup>72</sup> Sebagian tautan juga menjelaskan bagaimana kekhawatiran Arab Saudi tentang kerusuhan keluarga di Bahrain, pada KTT GCC di Riyadh Desember 2011, Arab Saudi mendorong GCC menjadi serikat politik untuk memastikan bahwa Syiah tidak berkuasa di Bahrain.<sup>73</sup> Meskipun intensitas konflik telah mulai reda, pasukan Arab Saudi tetap di Bahrain hingga saat ini, dan tidak ada laporan resmi yang menyatakan penarikan pasukan keamanan Saudi dan pasukan keamanan negara-negara Teluk lainnya dari Bahrain. Bahkan pada tanggal 16 Maret 2015, para pendemo Bahrain memperingati empat tahun intervensi Arab Saudi di Bahrain. Selain itu beberapa aktivis melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PBB di Jenewa meminta pemerintah Bahrain membebaskan ketua *Al-Wifaq* dan aktivis HAM yang ditangkap oleh rezim Al-Khalifa.<sup>74</sup>

### c. Penegasan Dukungan Arab Saudi dalam Pelaksanaan “*Consensus National Dialogue*”

Penjaga dua masjid suci, Raja Abdullah bin Abdulaziz, melakukan telepon pada tanggal 23 Maret 2011 terhadap Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa di Bahrain. Selama percakapan mereka, kedua pemimpin membahas hubungan bilateral dan perkembangan terbaru di wilayah tersebut. Raja Saudi menegaskan dukungan negaranya untuk stabilitas dan keamanan di Bahrain.<sup>75</sup>

72 Theguardian, *Saudi Arabian Troops Enter Bahrain As Regime Asks For Help To Quell Uprising*, Tersedia Di [Http://Www.Theguardian.Com/World/2011/Mar/14/Saudi-Arabian-Troops-Enter-Bahrain](http://Www.Theguardian.Com/World/2011/Mar/14/Saudi-Arabian-Troops-Enter-Bahrain), [22 Februari 2015]

73 Kennetz Katzman, Opcit., Hal 26-27

74 Irib, Protes Rakyat Bahrain Tolak Intervensi Saudi, Senin 16 Maret 2015 Tersedia Di [Http://Indonesian.Irib.Ir/Editorial/Fokus/Item/93116-Protes-Rakyat-Bahrain-Tolak-Intervensi-Saudi](http://Indonesian.Irib.Ir/Editorial/Fokus/Item/93116-Protes-Rakyat-Bahrain-Tolak-Intervensi-Saudi) Diakses [21 April 2015]

75 Saudi Arabia In Fokus 29 Maret 2011. Tersedia Di [Http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2011/11-Focus-03-29.Pdf](http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2011/11-Focus-03-29.Pdf) Diakses [15 Maret 2015]

Menteri Luar Negeri, Pangeran Saud Al-Faisal, yang memimpin delegasi kerajaan untuk sesi ke-120 pertemuan Dewan Menteri GCC yang diselenggarakan di Jeddah pada 11 September 2011 yang diikuti menteri luar negeri Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Maroko dan Yordania. Dalam pertemuan tersebut, Dewan Menteri menegaskan kembali komitmennya untuk stabilitas dan keamanan Bahrain dan menyatakan dukungan untuk kebijakan yang diambil pemerintah tersebut. Para menteri luar negeri menyambut pemilu yang dijadwalkan di Bahrain akhir bulan, yang akan memberikan kontribusi pada proses reformasi, serta peluncuran *National Consensus Dialogue* dan pembentukan komisi pencari fakta independen.<sup>76</sup>

*National Consensus Dialogue* datang dari inisiatif Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa. Dialog bertujuan membawa masyarakat ke dalam bermacam segmen. Raja memanggil untuk memulai *National Consensus Dialogue* pada tahun 2011. Dalam perintahnya untuk pemberian pandangan terhadap masyarakat dan tuntutannya untuk reformasi lebih lanjut dalam negara tanpa prasyarat dengan bermaksud untuk mencapai persetujuan umum semua peserta.<sup>77</sup> Dialog nasional akan diadakan dan digelar bulan Juli 2011 yang dipimpin oleh pembicara DPR, Khalifa bin Ahmed Al-Dharani. Diskusi fokus pada topik politik dibawah ketua Menteri Kehakiman Urusan Islam, Syaikh Khalid bin Ali Al-Khalifa, yang membahas topik politik untuk mencapai konsensus. Pelaksanaan dialog dinilai tidak kompeten, karena beberapa tokoh politik dipenjarakan dan tidak mencakup seluruh suara. Beberapa kali penundaan, akhirnya dialog nasional diresmikan pada Minggu, 10 Februari 2013 di *Al Areen Resort*. Di mana direktif kerajaan mengundang partai-partai politik dan badan-badan independen dari semua segmen masyarakat Bahrain. Dilanjutkan di sesi kedua pada hari Rabu, 13 Februari 2013, dimana pencapaian konsesus mengadopsi konsep dialog dan bukan negosiasi sebagai kelanjutan dari proses politik yang sebelumnya telah menyebabkan sejumlah hasil universal untuk membangun prestasi sebelumnya.<sup>78</sup> Sementara eskalasi kekerasan dan demonstrasi semakin meningkat pada tahun 2012-2013, dan pelaksanaan dialog nasional yang diadakan untuk mengatasi masalah krisis politik tidak sepenuhnya

76 Saudi Arabia In Fokus 13 September 2011. Tersedia Di [Http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2011/11-Focus-09-13.Pdf](http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/2011/11-Focus-09-13.Pdf) Diakses 15 Maret 2015

77 Nuwab. Abaout The National Dialogue, Tersedia <Http://Www.Nuwab.Gov.Bh/Mediacenter/Doclib/Nuwab%20web.Pdf> Diakses [20 April 2011]

78 Ibid.,

tercapai, karena ada perbedaan pendapat antara kelompok oposisi yang tidak menerima aturan konservatif rezim Al-Khalifa. Dialog nasional tidak disetujui oleh kelompok oposisi seperti *Al-Wifaq*, yang melaksanakan boikot pada pemilu 2014 dan mengajak masyarakat untuk tidak mengikuti pemilu 23 november 2014.

## Simpulan

Hubungan antara Arab Saudi dan Bahrain telah berlangsung lama, bahkan sebelum kemerdekaan rezim Al-Khalifa dengan telah dibantu keluarga Al-Saud untuk melawan Portugis dan kekaisaran Ottoman dan dibantu oleh Inggris keluarga Al-Khalifa dapat memegang kekuasaan di Bahrain di zaman modren pada abad ke 19. Pada tahun 1971, Bahrain resmi menjadi negara di bawah kekuasaan seorang *Amir*, yang pada saat itu dipegang oleh Syaikh Isa Al-Khlifah setelah penyelidikan pasukan khusus PBB. Hubungan diplomatik Arab Saudi dan Bahrain secara resmi dibuka pada 29 September 1971. Dan merupakan hubungan pertama di antara negara-negara Teluk lainnya. Hubungan diplomatik Arab Saudi dan Bahrain juga terintegrasi kedalam dewan kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council*) yang merupakan suatu organisasi kawasan Teluk bekerja sama dalam bidang ekonomi, keamanan, sosial dan politik, yakni sebuah kerja sama yang bertujuan untuk mencapai koordinasi, integrasi yang erat menuju persatuan di antara negara anggota, serta memperkuat pertalian hubungan yang erat menuju kerjasama diantara rakyat di kawasan Teluk.

Konflik dan krisis politik yang terjadi di Bahrain pada tahun 2011-2014 diakibatkan oleh pengaruh demokratisasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah atau yang lebih dikenal dengan *Arab Spring*. Proses reformasi demokrasi Bahrain memicu konflik *sectarian* antara Sunni dan Syiah yang memicu masuknya intervensi Arab Saudi di Bahrain.

Alasan Arab Saudi mendukung rezim pemerintahan Hamad bin Isa Al-Khalifa adalah kepentingan ideologi dan kepentingan keamanan. Kepentingan ideologi dimaksudkan adalah konflik Bahrain menimbulkan ancaman ideologi terhadap Arab Saudi anti-Syiah. Denga hipotesa adaya tekanan Arab Saudi terhadap Syiah di Bahrain dan mempertahankan eksistensi pemerintahan sunni Bahrain, meningkatnya dominasi Syiah melalui krisis politik Bahrain serta terancamnya rezim pemerintahan Hamad bin Isa Al-Khalifa yang merupakan sekutu dekat Arab Saudi di kawasan Teluk. Dukungan Arab Saudi meminimalisir konflik Bahrain melalui bantuan keamanan, ekonomi dan penyelesaian

konflik dan krisis politik Bahrain bertujuan untuk mengurangi dominasi dan ancaman iran di Bahrain serta ancaman terhadap aset-aset diplomatik dan perdangangan dan keamanan warga negara Arab Saudi di Bahrain yang mengarah pada kepentingan geopolitik.

Bentuk nyata dukungan Arab Saudi terhadap rezim pemerintahan Hamad bin Isa Al-Khalifa di Bahrain dari awal konflik hingga pelaksanaan pemilu di Bahrain pada tahun 2014 adalah: pertama, Arab Saudi mengirimkan pasukan keamanan pada bulan Maret 2011 untuk menjaga tempat-tempat strategis dari kelompok pemberontak radikal atas permintaan dan undagan dari raja Hamad bin Isa Al-Khlaifa di bawah komando pangeran Nayef Bin Abdullah Al-Asud bersama *Shield Peninsula Force* dengan alasan adanya pihak lain yang mencampuri urusan negara-negara Teluk termasuk di Bahrain.

Kedua, sebelum pengiriman pasukan keamanan Bahrain wakil menteri luar negeri Arab Saudi pada pertemuan GCC menyimpulkan memberikan bantuan ekonomi sebesar \$ 10 miliar paket pembangunan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial serta standar hidup di Bahrain dan Oman serta menyediakan perumahan kepada yang membutuhkan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pelayanan publik. Ketiga, Raja Abdullah bin Abdulaziz dan wakil menteri luar negeri Pangeran Saud Al-Faisal menegaskan komitmennya untuk berada di pihak pemerintahan dan mendukung stabilitas dan keamanan di Bahrain. keempat, wakil menteri luar negeri Arab Saudi pangeran Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz setelah sesi pertemuan GCC mengecam campur tangan Iran di negara-negara GCC, termasuk upaya Teheran untuk mendestabilisasi Bahrain dan pendudukan yang terus menerus dari tiga pulau milik UEA. Ia juga menyatakan penyesalan atas tidak adanya kemajuan dalam P5+1 pembicaraan tentang program nuklir Iran. Kelima dalam deklarasi proposal *GCC union*, meskipun tidak semua negara menyepakati, pihak Arab Saudi dan petinggi Bahrain menyebakati kerjasama lebih lanjut yang mengarah pada saudi-Bahrain union. Serta ucapan selamat atas pelaksanaan pemilihan parlemen 2014 dan keberhasilan rezim Hamad Bin Isa Al-Khalifa dalam menjalankan pemilu.

## Daftar pustaka

### **Jurnal**

- Ismail, Raihan. 2012. *The Saudi Ulema And The Shia Of Saudi Arabia*, Jurnal University Nasional Australia Vol.V.No.4 Australia
- Katzman, Kenneth. *Bahrain: Reform, Security, And Us Policy*, Cornell University Ilr Scholl, 2-21-2012, Congressional Research Service, Tersedia Di [Http://Digitalcommons.Ilr.Cornell.Edu/Cgi/View-content.Cgi?Article=1901&Context=Key\\_Workplace](Http://Digitalcommons.Ilr.Cornell.Edu/Cgi/View-content.Cgi?Article=1901&Context=Key_Workplace) diakses [15 april 2015]
- Kaza Dan M. Saeri, 2014. Dukungan Arab Saudi Terhadap Kudeta Mesir Tahun 2013, Jurnal Hubungan Internasional FISIP UR Vol.5. No2
- Kinninmont, Jane. 2012, *Bahrain: Beyond The Impasse*, Chatham House, The Royal Institute Of International Affair.
- Mabon, Simon. 2012, The Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry Summer, Journal Essay Volume XIX, Number 2
- Punzet, Agnieszka,. 2012. *Down To The Wiew In Bahrain: Last Chance For Real Political Reform*, Policy Deparment Belgium: European Union.
- Ronald E. Neumann, 2013. Bahrain: A Very Complicated Little Island, Winter 2013, Volume Xx, Number 4
- Stone, Marianne, \_\_\_. Security According To Buzan: A Comprehensive Security Analysis. New York: France Columbia University, School Of International And Public Affairs, Usa
- Vladimir Sulovic,. 2010. Meaning Of Security And Theory Of Securitization, BCSP Intern Serbia: Belgrade Centre For Security Policy.
- Mabon, Simon,. 2012. The Battle For Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry, Summer, Journal Essay Volume XIX, Number 2.

### **Research Paper**

- Andersen, Lars Erstev. 2012 *Bahrain And The Global Balance Of Power After The Arab Spring*, Diis Working Paper 2012:10
- Bahrain's Sectarian Challenge, Middle East Report N°40 – 6 May 2005 International Crisis Group Working To Prevent Conflict Worldwide, Tersedia Di <Http://Www.Crisisgroup.Org/~Media/Files/Middle%20east%20north%20africa/Iran%20gulf/Bahrain/Bahrains%20sectarian%20challenge.Pdf> Diakses [17 Mai 2015]

- Doha Institute, Assessment Report The Bahrain Situation: Arab For Center Research And The Policy Studies, Hal 3 Tersedia Di [Http://English.Dohainstitute.Org/File/Get/C88f7ee8-2ad0-4851-8d3b-23a700fd6745.Pdf](http://English.Dohainstitute.Org/File/Get/C88f7ee8-2ad0-4851-8d3b-23a700fd6745.Pdf) Diakses [10 April 2015]
- House Of Commons, 2013. *The Uk's Relations With Saudi Arabia Dan Bahrain: Fifth Report Of Seseion 2013-14* Vol 1. London : The Stationary Office Limited.
- United States Department, *Saudi Arabia 2012 International Religious Freedom Report*, Executive Summary International Religious Freedom Report for 2012. tersedia di [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing\\_note/join/2012/491449/EXPO-AFET\\_SP\(2012\)491449\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491449/EXPO-AFET_SP(2012)491449_EN.pdf) diakses [15 mai 2015]
- Gengler, Justin.J., 2011. *Ethnic Conflict And Political Mobilization In Bahrain And The Arab Gulf*, Michigan: The University Of Michigan.

### **Buku**

Reich, Bernard & David E. Long,. \_\_\_\_ (Edior)*The Goverment And The Politics Of The Middle Esat And North Africa*, Colorado, Westview Press.

### **Publikasi**

- Saudi Arabia In Fokus 29 Maret 2011.
- Saudi Arabia In Fokus Infokus 15 Maret 2011.
- Saudi Arabia In Fokus 13 September 2011.
- Saudi Arabia Infocus, 31 January 2012.
- Saudi Arabia Infokus 27 Desember 2012.
- Saudi Arabia Infokus 13 September 2011.
- Saudi Arabia Infokus 25 Maret 2014
- Saudi Arabia Infokus. 4 Juni 2013.
- Saudi Arabia, Infokus 15 Maret 2011
- Saudi Arabiai nfokus 22 Maret 2011Saudi Arabia, Infokus 22 Februari 2011,
- Tersedia Di <Http://Www.Saudiembassy.Net/Files/Pdf/Publications/Focus/..>

## Berita dan Artikel

- Associated Press, Bahrain Holds Its First Major Vote Since Unrest, Mailonline 22 November 2014 Tersedia Di [Http://Www.Dailymail.Co.Uk/Wires/Ap/Article-2845054/Bahrain-Holds-Major-Vote-Unrest.Html](http://Www.Dailymail.Co.Uk/Wires/Ap/Article-2845054/Bahrain-Holds-Major-Vote-Unrest.Html) [22 Desember 2014]
- Bbc, Bomb Blast Kills Three Bahrain Policemen, Tersedia Di <<Http://Www.Bbc.Com/News/World-Middle-East-26421744>> Diakses [28 November 2013]
- Bill Law, Bahrain Protests Prompt Global Concerns. Bbc News 15 Februari 2011, Tersedia Di <Http://Www.Bbc.Com/News/World-Middle-East-12471243> Diakses [20 Desember 2014]
- Brandon Friedman, Battle For Bahrain: What One Uprising Meant For The Gulf State And Iran, Tersedia Di <Http://Www.Worldaffairs-journal.Org/Article/Battle-Bahrain-What-One-Uprising-Meant-Gulf-States-And-Iran> Diakses [25 Maret 2015]
- Charles Gordon Smith, “Bahrain: Domestic And Foreign Relations Since Independence”, Tersedia Di <Http://Www.Britannica.Com/Ebchecked/Topic/49072/Bahrain/93662/Domestic-And-Foreign-Relations-Since-Independence>. Diakses [5maret 2015]
- Ed Husein, Bahrain: The Price And The Ayatollah, Tersedia Di [Http://Www.Nytimes.Com/2012/05/02/Opinion/The-Prince-And-The-Ayatollah.Html?Pagewanted=All&\\_R=0](Http://Www.Nytimes.Com/2012/05/02/Opinion/The-Prince-And-The-Ayatollah.Html?Pagewanted=All&_R=0) [Diakses 25 November 2014]
- Edigius Patrinistik, As “Dukung Dialog Nasional Bahrain” Kompas 28 Februari 2011, Tersedia Di <Http://Internasional.Kompas.Com/Read/2011/02/28/08530183/As.Dukung.Dialog.Nasional.Bahrain> Diakses [20 Desember 2014]
- Frank Kane, Uae And Saudi Arabia Send Forces To Bahrain. The National World 15 Maret 2011. Tersedia Di <Http://Www.Thennational.Ae/News/World/Middle-East/Uae-And-Saudi-Arabia-Send-Forces-To-Bahrain> Diakses [20 Desember 2014]
- Hosyen Ala'i, Proposed Bahrain-Saudi Union To Protect Regional Monarchies-Iran Analysis, Tersedia Di, [Http://Www.Biyokulule.Com/View\\_Content.Php?Articleid=6074](Http://Www.Biyokulule.Com/View_Content.Php?Articleid=6074) [Diakses 6 Maret 2015]
- Irib, Protes Rakyat Bahrain Tolak Intervensi Saudi, Senin 16 Maret 2015 Tersedia Di <Http://Indonesian.Irib.Ir/Editorial/Fokus/Item/93116-Protes-Rakyat-Bahrain-Tolak-Intervensi-Saudi> Diakses [21 April 2015]

- Justin Gengler, Other Side Radicalization In Bahrain, 15 Juli 2011, Tersedia Di <Http://Foreignpolicy.Com/2011/07/15/The-Other-Side-Of-Radicalization-In-Bahrain/> Diakses [25 Maret 2015]
- Kuwait City (Afp) Gulf States To Aid Unrest-Hit Bahrain, Oman: Report, Rabu, 02 Maret 2011, Tersedia Di <Http://Www.Alarabiya.Net/Articles/2011/03/02/139877.Html> Diakses [20 April 2015]
- Mahmoud Rafique, Bahrain Inks Six Agreements With Gcc Marshall Plan, 24x7 News 31 Desember 2012. Tersedia Di <Http://Www.Twentyfoursevennews.Com/Bahrain-News/Bahrain-Inks-Six-Agreements-With-Gcc-Marshall-Plan/> Diakses [15 April 205]
- Rania El-Gamal Dan Sylvia Westall , Saudi Prince Says Gulf States Must Balance Threat From Iran Reuters, Dubai Tersedia Di [Http://English.Alarabiya.Net/En/News/Middle\\_East/2014/04/23/Saudi-Prince-Says-Gulf-States-Must-Balance-Threat-From-Iran.Html](Http://English.Alarabiya.Net/En/News/Middle_East/2014/04/23/Saudi-Prince-Says-Gulf-States-Must-Balance-Threat-From-Iran.Html) 22 Februari 2015
- Robert Mason , “The Gradual Tilt To Asia: Cause For Re-Defining Saudi Arabia’s Regional Environment?” Tersedia Di <Http://Www.E-Ir.Info/2012/10/03/The-Gradual-Tilt-To-Asia-Cause-For-Re-Defining-Saudi-Arabias-Regional-Environment/> Diakses [ 2 Maret 2015]
- Surris 11 Desember 2014, Gcc Summit Wrapup, Tersedia Di <Http://Susris.Com/2014/12/11/Gcc-Summit-Wrapup/> Diakses [17 April 2015]
- Theguardian, Saudi Arabian Troops Enter Bahrain As Regime Asks For Help To Quell Uprising, Tersedia Di <Http://Www.Theguardian.Com/World/2011/Mar/14/Saudi-Arabian-Troops-Enter-Bahrain>, [22 Februari 2015]
- Toby C. Jones, Bahrain’s Revolutionaries Speak: An Exclusive Interview With Bahrain’s Coalition Of February 14th Youth, Tersedia Di [Http://Www.Jadaliyya.Com/Pages/Index/4777/Bahrains-Revolutionaries-Speak\\_An-Exclusive-Interv](Http://Www.Jadaliyya.Com/Pages/Index/4777/Bahrains-Revolutionaries-Speak_An-Exclusive-Interv) [Diakses 15 Maret 2015]
- Us Embassy Cables: Guide To Bahrain’s Politics, Tersedia Di <Http://Www.Theguardian.Com/World/Us-Embassy-Cables-Documents/168471> Diakses 14 Maret2015
- Will Fulton, Ariel Farrar-Wellman, 2011 Bahrain-Iran Foreign Relations, Tersedia Di <Http://Www.Irantracker.Org/Foreign-Relations/Bahrain-Iran-Foreign-Relation>. Diakses[ 5 Maret 2015]